

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA  
BOYOLALI**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

**Bagus Prasetyo**

**B200100353**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:  
**“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
Pratama Boyolali”.**

Yang disusun oleh:


**BAGUS PRASETYO**

**B200100353**

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
untuk diterima.

Surakarta, Oktober 2014

Co. Pembimbing



  
(Eny Kusumawati, Ak, SE)

Pembimbing

  
(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
  
(Dr. Triyono, M.Si, Ak)

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : BAGUS PRASETYO

NIM : B200010353

Fak/ Prodi : FEB / AKUNTANSI

Jenis : Skripsi

Judul : **Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan / mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 Desember 2014

Yang Menyatakan,



Bagus Prasetyo

B200010353

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden pekerja bebas di kabupaten Boyolali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas adalah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Sedangkan prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali.

**Kata kunci:** *sistem administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pekerja bebas*

## **Pendahuluan**

### Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting, karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Modernisasi perpajakan bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata, namun juga tanggung jawab masyarakat sebagai Wajib pajak, dengan cara meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam kenyataannya, wajib pajak memiliki kecenderungan perilaku melakukan ketidakpatuhan perpajakan karena pada dasarnya tidak ada orang yang suka membayar pajak. Kenyataan yang ada di lapangan, wajib pajak yang cenderung melakukan ketidakpatuhan tersebut adalah wajib pajak pekerja bebas, karena kantor pelayanan pajak tidak bisa mendeteksi secara langsung besar jumlah pajak yang disetor dan hanya bergantung pada kejujuran para pekerja bebas dalam mengisi form SPT.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang. Kedua, latar belakang sosial ekonomi penduduk yang bermacam-macam di Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini penulis mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Rapina et al (2011) dengan variabel independen yang sama dan variabel dependen yang sedikit berbeda. Variabel dependen dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada kepatuhan wajib pajak pekerja bebas sedangkan pada penelitian terdahulu lebih luas yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### 1. Tujuan

- a. Mengetahui pengaruh modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali
- b. Mengetahui pengaruh modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali
- c. Mengetahui pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali
- d. Mengetahui pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali

### **Tinjauan Pustaka**

Pajak merupakan pungutan dari Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang jelas. Pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) secara individual dari Negara terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sinaga (2011), sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Fasmi dan Misra (2013). bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya, penelitian Irawan dan Khairani (2013) membuktikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana

nilai F hitung  $2,865 > F$  tabel  $2,48$ . Tetapi secara parsial struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak, dimana nilai nilai t tabel lebih besar daripada t hitung.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilina dan Pusposari (2013) menunjukkan bahwa secara parsial variabel modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan untuk variabel modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Rapina, et al (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya, Rapina, et al(2011) berhasil membuktikan bahwa pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari subvariabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi memiliki kontribusi yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung “X”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur organisasi, implementasi pelayanan, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang menggunakan penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak pekerja bebas, khususnya tenaga ahli. Alasan peneliti menentukan pekerja bebas sebagai sampel dalam penelitian ini karena tenaga ahli merupakan pekerja bebas yang memiliki kemungkinan paling besar dalam ketidakpatuhan pembayaran pajak.

### **Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro, et al. 2002). Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang menjadi sampel untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuisioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah wajib pajak pekerja bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner. Menurut Ulum (2011), teknik pengumpulan data kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, dimana responden dapat memilih jawaban yang telah disediakan di dalam kuisioner. Kuisioner dibagikan kepada wajib pajak pekerja bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang telah dipilih untuk menjadi responden.

### **Teknik Analisis Data**

#### **1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tentang variabel-variabel yang diteliti dengan menarik kesimpulan di akhir penelitian.

#### **2. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**



Sekaran (2003) dalam Rapina, *et al* (2011) mengemukakan bahwa uji validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan ahli. Dengan kata lain semakin tinggi validitas suatu test maka alat test tersebut semakin tepat mengenai sarannya. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Jika nilai  $r$  hitung  $\geq$  nilai  $r$  tabel maka alat test yang digunakan valid, sebaliknya Jika nilai  $r$  hitung  $\leq$  nilai  $r$  tabel maka alat test yang digunakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner (Rapina,*et al*.2011). Penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* untuk uji reliabilitas. Semakin besar nilai alphanya, semakin tinggi tingkat reliabilitasnya. Menurut Nunnaly (1969) dalam Rapina, *et al*(2011) suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$ .

### 3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikan) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan (Sinaga, 2011:117). Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian *Kolmogorof-Smirnov*. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikan  $> 0,05$ , dan sebaliknya data tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan  $< 0,05$ .

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan pengujian yang menguji adanya hubungan yang kuat diantara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan nilai

*variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Apabila dalam hasil perhitungan diperoleh nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai dari VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi, dan sebaliknya apabila dalam hasil perhitungan diperoleh nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai dari VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang menguji adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleyser sebagai indikator terjadinya heteroskedastisitas. Apabila dalam perhitungan diperoleh bahwa nilai signifikansi (Sig) dari keempat variabel *independent* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terkena heteroskedastisitas, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi (Sig) dari keempat variabel *independent* lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terkena heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis data yang diperoleh menggunakan uji regresi linier berganda karena terdapat lebih dari satu *variable independent*. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *variable independent* terhadap *variable dependent*. Pada penelitian ini digunakan rumus regresi linier:

$$KWP_{pb} = \alpha + \beta_1 S_{to} + \beta_2 P_{ro} + \beta_3 S_{go} + \beta_4 B_{do} + \epsilon$$

Keterangan:

$KWP_{pb}$  : Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

$\alpha$  : Nilai konstan

$S_{to}$  : Struktur organisasi

$P_{ro}$  : Prosedur organisasi

$S_{go}$  : Strategi organisasi

$B_{do}$  : Budaya organisasi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : koefisien regresi masing-masing *variable independent*  
 $\varepsilon$  : Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

## 5. Uji Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Uji korelasi berganda digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel *independent* yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependentnya* yaitu kepatuhan wajib pajak peerja bebas. Sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

## 6. Uji Hipotesis

### a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh *variable independent* terhadap *variable dependent* secara simultan. Hasil perhitungan (F hitung) kemudian dibandingkan dengan nilai (F tabel) dengan tingkat *level of significant* 0,05 dan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak (signifikan), artinya bahwa terdapat pengaruh antara *variable independent* dengan *variable dependent* secara simultan. Sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima (tidak signifikan), artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara *variable independent* dengan *variable dependent* secara simultan.

### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menyatakan proporsi atau prosentase total variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2011: 108).

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti nilai variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 110).

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing *variable independent* terhadap *variable dependent* secara parsial. Hipotesis diuji dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat *level of significant* 0,05 dan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) maka  $H_0$  ditolak (signifikan), artinya bahwa terdapat pengaruh antara *variable independent* dengan *variable dependent* secara parsial. Sebaliknya apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima (tidak signifikan), artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara *variable independent* dengan *variable dependent* secara parsial.

## **Pembahasan**

### 1. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan beberapa sub unit yang terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Unsur-unsur yang berkaitan antara lain pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengeluaran, dan konsultasi.

Salah satu peran dalam struktur organisasi perpajakan yaitu Account Representative (AR). Account Representative merupakan penghubung antara wajib pajak dengan kantor pajak yang bertanggung jawab membimbing wajib pajak pekerja bebas tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Account representative yang terdapat pada setiap kantor pajak belum seimbang dengan jumlah wajib pajak pekerja bebas yang ditangani sehingga hal ini mempengaruhi pelayanan yang dilakukan oleh account representative tersebut

dan menjadi salah satu penyebab menurunkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dalam melaksanakan kewajibannya.

Mengetahui hal tersebut maka dilakukan modernisasi pada struktur organisasi perpajakan yang dirancang sesuai dengan fungsi dan pemisahan yang jelas antara kamwil dan KPP. Hal ini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/01/2003 (Sofyan, 2005).

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini terbukti bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan  $t$  sebesar  $0,203 > 0,05$ . Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra et. al 2003.

## 2. Pengaruh prosedur organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karier. Penerapan modernisasi prosedur organisasi antara lain ditunjukkan melalui adanya perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, inovasi proses perubahan metode operasi dan informasi. Jika wajib pajak pekerja bebas enggan untuk ke KPP maka dapat juga dilakukan secara *online* dan mengirimkan hasil isian identitas yang telah dicetak melalui kantor pos terdekat dan kemudian kantor pajak mengirimkan NPWP melalui alamat asli dari wajib pajak pekerja bebas tersebut.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas karena wajib pajak memperoleh pelayanan penuh, karena tiap aparat menangani satu wajib pajak dan waktu dalam menyelesaikan administrasi dapat dilakukan dengan cepat.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar  $0,025 < 0,05$ . Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), Irawan dan Khairani (2013).

## 3. Pengaruh strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas

Strategi Organisasi berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta penerimaan SPT. Pegawai pajak secara berkala berupaya melakukan sosialisasi

dalam bentuk pendekatan kepada masyarakat untuk mengenalkan manfaat dan fungsi pajak serta tujuan adanya pajak yang digalakkan pemerintah dalam upaya *good governance*. Upaya yang dilakukan oleh DJP yang semakin sering melakukan acara untuk mengumpulkan masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait dengan langkah-langkah dalam merintis sebagai seorang pengusaha sukses.

Dalam pelatihan tersebut masyarakat juga dibimbing dalam hal perpajakannya mulai dari mendaftarkan calon wajib pajak untuk memiliki NPWP maupun memiliki NPPKP. Sedangkan dari fiskus sendiri, pemerintah memberikan remunerasi terhadap penghasilan untuk mengurangi adanya penyelewengan pajak yang dilakukan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ . Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), Candra, *et al* (2013), Irawan dan Khairani (2013).

#### 4. Pengaruh budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas

Budaya organisasi merupakan suatu bentuk pencitraan fiskus terhadap masyarakat, karena peran fiskus sangat berpengaruh terhadap fungsi dari pajak. Upaya fiskus dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bukan hanya dari segi ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam kode etik dan besarnya pajak yang berhasil dihimpun setiap tahunnya. Masyarakat berpendapat bahwa setiap aparatur pajak wajib menanamkan nilai dan norma untuk tidak melakukan hal yang merugikan Negara. Apabila nilai norma tersebut dilanggar maka akan ada sanksi-sanksi tertentu untuk dijadikan pertimbangan bagi para pegawai pajak agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas karena aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua wajib pajak tanpa memandang besar

kecilnya pajak terutang dan adanya kejujuran aparat pajak dalam ketepatan dan ketegasan mengenai penerapan undang-undang.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aprilina (2013).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil data dan pembahasan hipotesis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Bahwa *Account Representative* belum maksimal dalam melakukan fungsi sebagaimana mestinya yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya setiap satu dari diri wajib pajak mempunyai satu orang *Account Representative*. *Account Representative* yang ada di setiap Kantor Pajak hanya sedikit, satu *Account Representative* menangani ratusan bahkan ribuan wajib pajak tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak yang ditangani.
2. Prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Penerapan modernisasi prosedur organisasi anatara lain ditunjukkan melalui adanya perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, inovasi proses perubahan metode operasi dan informasi. Jika wajib pajak pekerja bebas enggan untuk ke KPP maka dapat juga dilakukan secara *online* dan mengirimkan hasil isian identitas yang telah dicetak melalui kantor pos terdekat dan kemudian kantor pajak mengirimkan NPWP melalui alamat asli dari Wajib Pajak tersebut.
3. Strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Strategi Organisasi berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta penerimaan SPT. Pegawai pajak secara berkala berupaya melakukan sosialisasi dalam bentuk pendekatan kepada masyarakat untuk mengenalkan manfaat dan fungsi pajak serta tujuan adanya pajak yang digalakkan pemerintah dalam upaya *good governance*. Upaya yang dilakukan oleh DJP yang semakin sering

melakukan acara untuk mengumpulkan masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait dengan langkah-langkah dalam merintis sebagai seorang pengusaha sukses.

Dalam pelatihan tersebut masyarakat juga dibimbing dalam hal perpajakannya mulai dari mendaftarkan calon wajib pajak untuk memiliki NPWP maupun memiliki NPPKP. Sedangkan dari fiskus sendiri, pemerintah memberikan remunerasi terhadap penghasilan untuk mengurangi adanya penyelewengan pajak yang dilakukan.

4. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Budaya organisasi merupakan suatu bentuk pencitraan fiskus terhadap masyarakat, karena peran fiskus sangat berpengaruh terhadap fungsi dari pajak. Upaya fiskus dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bukan hanya dari segi ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam kode etik dan besarnya pajak yang berhasil dihimpun setiap tahunnya. Masyarakat berpendapat bahwa setiap aparatur pajak wajib menanamkan nilai dan norma untuk tidak melakukan hal yang merugikan Negara. Apabila nilai norma tersebut dilanggar maka akan ada sanksi-sanksi tertentu untuk dijadikan pertimbangan bagi para pegawai pajak agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

### **Saran**

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali:

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dari petugas pajak untuk meningkatkan struktur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang optimal dari petugas pajak kepada wajib pajak pekerja bebas dan meningkatkan struktur dalam sosialisasi kepada wajib pajak pekerja bebas. Dengan dilakukannya upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sebaiknya perlu diadakan kebijakan baru dengan diadakan suatu modernisasi sistem informasi dalam proses operasional pelayanan yang



lebih modern, dengan mengganti kinerja manual menjadi lebih canggih dan modern.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel yang lain dan menambahkan model regresi yang lain agar dapat membandingkan dan menyempurnakan hasilnya dengan penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya juga disarankan agar dapat menambah jumlah KPP Pratama sehingga data yang didapat lebih banyak dan hasilnya lebih lengkap dan lebih baik.

**Daftar Pustaka**

- Aprilina, Ria. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*. Jurnal Akuntansi.
- Candra, Ricki, Haris Wibisono dan Mujilan. 2013. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.1 No.1 Februari 2013.
- cWiexz. 2009. *Reformasi Perpajakan di Indonesia* (online), (<http://cwiexz.blogspot.com/2009/11/reformasi-perpajakan-di-indonesia.html>), diakses 20 Juni 2014).
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2013. Data base Wajib Pajak KPP Pratama Boyolali.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Seri PPh-Pajak Penghasilan Pajak 21. 2012. (online), (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21>), diakses 25 Juni 2014).
- Sinaga, Ulam. 2011. *Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Vatmawati. 2013. Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional. (online),  
([file:///E:/Pengertian%20Administrasi%20Perpajakan,%20Kepatuhan%20dan%20Pajak%20Internasioanal%20\\_%20Vatmawatigeool%27s%20Blog.html](file:///E:/Pengertian%20Administrasi%20Perpajakan,%20Kepatuhan%20dan%20Pajak%20Internasioanal%20_%20Vatmawatigeool%27s%20Blog.html)  
1 diakses 25 Juni 2014).

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)